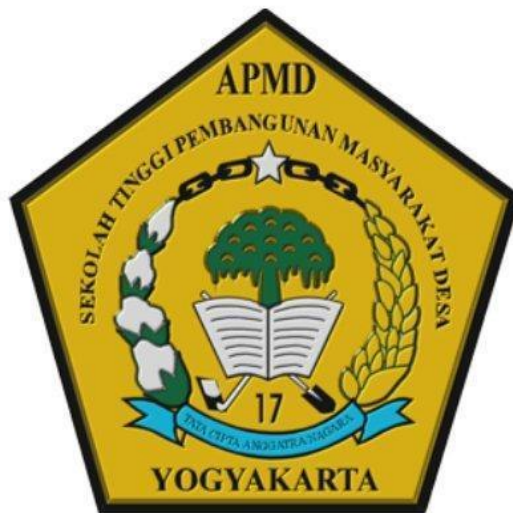


**SKRIPSI**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN  
POTENSI WISATA BUDAYA**

**(Studi di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat,  
Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur)**



**Disusun Oleh :**

**RUSTINI RAMBU KUBA YOWI**

**19520072**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN  
POTENSI WISATA BUDAYA**

**(Studi di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat,  
Kabupaten Sumba Tengah)**

**SKRIPSI**

**APMD**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Jentang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

**RUSTINI RAMBU KUBA YOWI**

**NIM: 19520072**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**

ii



## HALAMAN PENGESAHAN



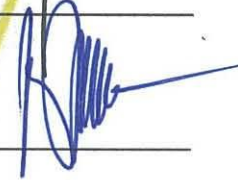
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Mei 2023

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustini Rambu Kuba Yowi

NIM : 19520072

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BUDAYA” (Studi di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah)** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Rustini Rambu Kuba Yowi

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang luar biasa melimpah, kemurahan, kasih karunia serta kasih setia-Nya yang begitu besar dan terus dinyatakan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya” studi di Desa Uumbu Pabal, Kecamatan Uumbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan support, sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan, serta nasehat-nasehat yang sangat mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga

penulis dapat menyelesaikan segala mata pelajaran dan perkuliahan dengan baik.

5. Pemerintah Desa Uumbu Pabal yang dengan baik hati memberikan izin, bantuan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Uumbu Pabal.
6. Bapak Uumbu Lepa Sabaora dan Ibu Faroki Rambu Tawunga Rija selaku orang tua terkasih yang selalu mendukung, menopang dan terus mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan dilapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Penulis



Rustini Rambu Kuba Yowi

## **MOTTO**

**“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu.”**

**(Amsal 3:5-6)**

**“Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan.**

**Jangan pernah mengeluh dan teruslah berpengharapan,**

**yakin dan percaya kamu akan menerimanya”**

**(Penulis)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur dan terimakasih saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah, berkat, kasih dan kemurahan-Nya yang begitu luar biasa dicurahkan atas kehidupan saya pribadi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua yang sangat saya cintai, Papa Umbu Lepa Sabaora dan Mama Faroki Rambu Tawunga Rija yang selalu menjadi panutan saya, yang senantiasa mendoakan, penuh kesabaran mendidik, menasehati serta memotivasi saya untuk terus semangat dan pantang menyerah, dan juga yang sudah banyak berkorban demi kebaikan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Semua keluarga besar, kakak dan adik-adik saya (Satriawan, Sanorita, Lestary, Arianto, Ansor, dan Nova) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan baik secara moral dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Marchviano Barataman, yang selalu menjadi support system dan membantu saya dalam mencari referensi serta selalu mendoakan saya, sehingga saya bisa terus semangat.



5. Sahabat-sahabat saya (Ilka, Melan, Felis, Ayu dan Wulan) yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Semua teman-teman UKM Kristen Protestan Filadelfia, teman-teman praktikum, teman-teman KKN serta teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. <i>Literature Review</i> .....	6

E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II.....</b>	<b>36</b>
<b>GAMBARAN UMUM DESA UMBU PABAL.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Umbu Pabal.....	36
1. Kondisi Geografis.....	36
2. Keadaan Demografis.....	39
3. Keadaan Ekonomi.....	42
4. Keadaan Sosial.....	43
5. Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan.....	44
6. Keadaan Prasarana.....	45
7. Kondisi Pemerintahan Desa Umbu Pabal.....	45
B. Gambaran Umum Objek Wisata Budaya.....	46
1. Sejarah Objek Wisata Budaya.....	46
2. Asas Pembentukan.....	48
3. Visi Objek Wisata Budaya.....	49
4. Misi Objek Wisata Budaya.....	49
5. Kepengurusan Objek Wisata Budaya.....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BUDAYA .....	50
A. Kapasitas Regulasi .....	50
B. Kapasitas Ekstraksi .....	59
C. Kapasitas Distributif.....	63
D. Kapasitas Responsif .....	67
E. Kapasitas Jaringan.....	69
BAB IV .....	72
KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Lahan Menurut Peruntukan.....	37
Tabel 2. 2 Dusun dan Kepala Dusun Desa Umbu Pabal.....	38
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga (RT).....	40
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 2. 6 Organisasi Kemasyarakatan.....	44
Tabel 2. 7 Prasarana Desa Umbu Pabal .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 3. 1 Kondisi Jalan Desa Menuju Objek Wisata.....	55
Gambar 3. 2 Puncak Desa Umbu Pabal .....	60
Gambar 3. 3 Agro Wisata Persawahan .....	61
Gambar 3. 4 Rumah Adat Sumba .....	61
Gambar 3. 5 Kuburan Megalitik .....	62
Gambar 3. 6 Kerajinan Tangan .....	63

## INTISARI

Objek wisata di Desa Umbu Pabal merupakan inisiatif masyarakat desa dan telah ada sejak lama, yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Daya tarik wisata desa ini menyediakan daya tarik wisata budaya bagi masyarakat setempat. Desa yang kental akan budayanya di Umbu Pabal merupakan salah satu desa yang unik. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa memiliki kewenangan mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa. Kewenangan ini salah satunya terkait pengembangan objek wisata yang ada di desa. Namun dalam pengembangan objek wisata budaya di Desa Umbu Pabal ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya Pemerintah Desa belum memberikan perhatian khusus terkait sarana prasarannya, Pemerintah Desa belum membuat kebijakan untuk retribusi wisata, Koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa juga dapat dikatakan masih sangat kurang. Penelitian ini akan mengarahkan perhatian pada dimensi *governability* yaitu kapasitas Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya. Dalam penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus atau pengelola Objek Wisata Budaya, dan Tokoh Masyarakat. Pengambilan Narasumber didasarkan atas tujuan tertentu yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai sampel. Dalam menganalisis data dilakukan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan klarifikasi data untuk penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Budaya” Maka dapat ditarik 4 kesimpulan yaitu: 1). Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebenarnya sudah ada, tetapi beberapa tahun belakangan ini kebijakan tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi dikarenakan Pemerintah Desa Umbu Pabal lebih mengutamakan pengembangan disektor pertanian dan juga pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga pemulihan ekonomi masyarakat lebih diutamakan. 2). Dari hasil pendataan objek wisata terdapat cukup banyak objek wisata yang ada di Desa Umbu Pabal. Tetapi dalam pengembangannya masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya retribusi wisata sehingga kunjungan terhadap objek wisata tersebut masih gratis. 3). Pemerintah Desa Umbu Pabal belum mengalokasikan sumber daya berupa dana untuk objek wisata budaya 2 tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena pemerintah desa berkonsentrasi pada penganggaran dan pengalokasian sumberdaya kepada pembangunan desa lainnya. 4). Lemahnya Koordinasi Kelembagaan Desa, Pendanaan dan sebagainya sehingga pengembangan wisata budaya mengalami penyusutan baik sarana prasarana dan fasilitas pendukung wisata budaya.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Kapasitas, Wisata Budaya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa memiliki empat jenis kewenangan yaitu kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang Desa maka desa memiliki kewenangan mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa. Kewenangan ini salah satunya terkait pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Objek wisata di Desa Umbu Pabal merupakan inisiatif masyarakat desa dan telah ada sejak lama, yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Daya tarik wisata desa ini menyediakan daya tarik wisata budaya bagi masyarakat setempat. Desa yang kental akan budayanya di Umbu Pabal merupakan salah satu desa yang unik. Desa Umbu Pabal ini mempunyai alternatif wisata seperti rumah-rumah adat yang tersedia pakaian-pakaian adat yang bisa digunakan serta, kuburan megalitikum (kuburan dulu) yang dapat dijadikan tempat untuk berfoto yang unik. Di Desa Umbu Pabal sendiri masyarakatnya mempunyai ide atau inovasi untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari bambu dan masyarakat

Desa Umbu Pabal juga menenun kain, dengan menggunakan alat yang masih sangat tradisional. Desa ini memiliki objek wisata budaya yang terkenal di Sumba Tengah yaitu suatu tradisi yang wajib dilakukan setiap tahunnya yang biasa dikenal dengan Ritual adat “Purungu Taliang Marapu” atau Turun Kegoa Marapu. Ini adalah sebuah ritual adat yang sangat menarik dimana ritual adat ini sebagai bentuk untuk memprediksi atau meramalkan musim lapar atau musim kenyang bagi masyarakat Sumba Tengah.

Ritual adat ini dilakukan didalam sebuah kampung Kamba Djawa di Desa Umbu Pabal itu dilakukan karena kampung ini dikenal sakral yang dimana terdapat bangunan adat berupa rumah kilat atau yang biasa disebut rumah marapu di tengah kampung tersebut, di rumah itulah ritual adat “purungu taliang marapu” dilakukan. Ritual adat ini kerap dikunjungi oleh seluruh masyarakat Sumba Tengah dan Turis hal ini karena selain ritual adatnya kehidupan di Desa Ini juga dikenal sangat arif, masyarakat adat di Desa tersebut sangat patuh terhadap nilai-nilai leluhur yang ada serta memiliki keindahan alam yang sangat indah dan eksotis sehingga mengundang kekaguman alam yang terbentang di Desa Umbu Pabal.

Namun dalam objek wisata budaya di Desa Umbu Pabal ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya dalam pengembangan objek wisata budaya Pemerintah Desa belum memberikan perhatian khusus terkait sarana prasarannya sehingga pengunjung yang datang mengunjungi objek wisata menjadi kurang nyaman. Kemudian objek wisata budaya ini sebenarnya dapat menambah pendapatan asli desa tetapi Pemerintah Desa belum membuat kebijakan untuk retribusi wisata. Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, di Desa Umbu

Pabal juga, beberapa masyarakat merupakan pengrajin tenun ikat tetapi, hanya dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan belum bisa berkembang lebih baik karena tidak difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa juga dapat dikatakan masih sangat kurang, dimana ini terjadi karena Pemerintah Desa Umbu Pabal tidak terlalu mementingkan objek wisata budaya yang ada karena menurut mereka wisata seperti ini sudah biasa terjadi di Sumba. Dengan demikian pemerintah desa lebih fokus memperhatikan peternakan dan pertanian saja sehingga objek wisata ini seperti diabaikan atau tidak terlalu diperhatikan sehingga tidak adanya kebijakan pemerintah mengalokasikan dana untuk pengembangan objek wisata.

Padahal objek wisata ini cukup ramai dikunjungi, dan untuk pendapatan dari objek wisata ini dalam sebulan sekitar 20-30 juta (hasil penjualan tenun ikat yang dibeli langsung ke pengrajin), uang tersebut dikelola kembali oleh kelompok masyarakat pengrajin tenun. Tetapi sampai sekarang Pemerintah belum ada upaya untuk mengembangkan objek wisata budaya ini menjadi lebih baik, Padahal dalam pengembangan objek wisata di desa ini masih sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai seperti akses jalan yang bagus, rumah makan, pos keamanan dan tempat pembuangan sampah. Objek wisata budaya ini sebaiknya diberi perhatian khusus oleh Pemerintah Desa agar objek wisata bisa terus berkembang dari segala bidang. Arah dan kebijakan dari Pemerintah Desa sebaiknya dapat mengembangkan dan melestarikan objek wisata budaya tersebut.

Tetapi kapasitas dari Pemerintah Desa belum sampai pada upaya pengembangan objek wisata budaya dan menjadikan itu aset paling berharga yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah Desa saat ini masih terfokus pada pembangunan

infrastruktur dan peningkatan pelayanan administrasi sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tentunya kurang sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 4 bagian (c) berkaitan dengan tujuan dari pengaturan Desa, yakni: melestarikan, mengembangkan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan prespektif ilmu pemerintahan yaitu *Governability* (G3) karena yang akan dianalisis sebagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan potensi wisata budaya. *Governability* merupakan kapasitas Pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta untuk mengatur masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Menurut Piere dan Peters (2000 : 5-10), *Governability* juga dapat dipahami sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan. Pola tersebut, berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sehingga, dengan adanya regulasi dan peraturan tersebut pemerintah mampu mengatur dan mengurus segala kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini akan mengarahkan perhatian pada dimensi *governability* yaitu kapasitas Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya. Maka dari itu saya tertarik untuk menganalisis sejauh mana perkembangan potensi wisata budaya ini dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya” yang ada di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari alur persoalan yang ada di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya ?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan kapasitas Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya di Desa Umbu Pabal; dan
- b. Mengetahui kendala-kendala dalam pengembangan potensi wisata budaya di Desa Umbu Pabal.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini maka, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Desa Umbu Pabal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Umbu Pabal terkait pengembangan potensi wisata budaya.

b. Bagi STPMD “APMD” Yogyakarta

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan tambahan untuk perpustakaan STPMD “APMD” Yogyakarta.

**D. Literature Review**

Berkaitan dengan judul ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ialah. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Muhammad Edo Edi Sriyono pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dengan Konsep Penta Helix”. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimisasi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang berbasis kearifan lokal serta penerapan konsep collaborative governance penta helix. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui desa wisata yang berbasis lokal memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa collaborative governance penta helix berpengaruh terhadap optimalnya pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa wisata berbasis kearifan lokal.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Komariah, Encang Saefudin, dan Pawit M Yusup pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan desa wisata berbasis

kearifan lokal terutama yang berkaitan dengan konsep kriteria desa wisata yang ada di Desa Paledah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian, yang dimana terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan kemandirian.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Harne Julianti Tou, Melinda Noer, dan Sari Lenggogeni pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan” Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan desa wisata, kearifan lokal, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sehingga menjadi dasar pemikiran dari pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang dimana merupakan tanggung jawab semua stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan terutama sekali masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Gina Lestari, Armaidly Armawi, dan Muhammad pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah”. Penelitian ini dilaksanakan di desa wisata pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan partisipasi pemuda dalam pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat (*community based tourism*) dan kontribusinya terhadap ketahanan sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan bagian bagian dari aktor pengelola *community based tourism* di Desa Wisata Pentingsari. Partisipasi pemuda berada pada tingkat partisipasi citizen power dengan bobot rata-rata 70 persen. Model pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Pentingsari berkontribusi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berdasarkan parameter asas kemitraan kesejahteraan, perlindungan, kemandirian, kerukunan, nilai sosial dan budaya lokal. Ketahanan sosial dan budaya wilayah terbentuk melalui pelestarian sosial budaya secara dinamis dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sosial-budaya lokal melalui aktivitas pariwisata (Lestari, dkk, 2016)

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh M.A. Sutiarmo, K.T.P. Arcana, N.P.E. Juliantari, dan I.M.B. Gunantara pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya”. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi rencana strategis pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas rencana strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung adalah dengan mengembangkan produk wisata, meningkatkan pengelolaan dan pemasaran.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa Indrawan, Efrizal Adil, dan Dian Septian Sari pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Model Tata Kelola Pemerintahan Desa Gada Berbasis Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kualitas Pelayanan Untuk Mendukung Pencapaian Desa Wisata”.



Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gada, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunung sitoli, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tata kelola pemerintahan Desa Gada untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa melalui budaya organisasi, komitmen organisasi dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan mampu mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. budaya organisasi memiliki efek positif pada tata kelola pemerintahan desa. Artinya, jika semakin tinggi budaya organisasi yang dimiliki oleh perangkat desa, maka tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik.

Berdasarkan *Literature review* dari keenam jurnal diatas yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi wisata budaya ini yaitu terkait dengan Kapasitas Regulasi, Kapasitas ekstraksi, Kapasitas distributif, Kapasitas Responsif, Serta Kapasitas Jaringan yang dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Umbu Pabal untuk pengembangan objek wisata budaya, potensi objek wisata dan kerajinan tangan yang ada di Desa Umbu Pabal, Pendanaan akan objek wisata budaya, dan melihat upaya Pemerintah Desa Umbu Pabal dalam Membangun jaringan dengan masyarakat desa.

## **E. Kerangka Konseptual**

### ***1. Governability***

Sutoro Eko menjelaskan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Governabilitas berbicara dua hal, yaitu otoritas dan kapasitas. Itulah sebabnya Kooiman (1994) menganggap *governability* berkaitan dengan mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Menurut Kooiman (1994 : 28) *governability* berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Meski demikian, *governability* seringkali memunculkan ketidakpastian dalam entitas sosialnya. Hal ini terjadi karena pada waktu dan tempat tertentu kemampuan tersebut bersifat tinggi, sementara di tempat dan waktu yang lain mungkin saja rendah. Jika dipahami seperti itu, maka kita dapat mengetahui bahwa konsepsi Kooiman tentang *governability* merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memerintah sekaligus menyatukan setiap kepentingan masyarakatnya sehingga mereka tergerak untuk berpartisipasi. Selain itu, respon dari pemerintah untuk setiap permasalahan kebijakan tidak harus selalu sama, atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara harafiah, *governability* berarti kemampuan pemerintah dalam memerintah (*ability of government in governing*). Ada tiga persepektif yang biasa dipakai untuk memahami makna ini, yaitu: Pertama, perspektif yang memerintah (*governing*) terutama pemerintah. Kedua, perpektif yang diperintah (*governed*). Menurut perspektif ini, negara adalah subjek yang diperintah oleh pemerintah.

Perspektif ini berbicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi. Ketiga, perpektif interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang governance.

*Governability* mengandung lima dimensi, yaitu legitimasi, otoritas, aktivitas, kapasitas, dan efektivitas memerintah yang dilakukan pemerintah. Otoritas, kapasitas, dan efektivitas dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat dan otonom. Dengan begitu, yang memerintah bukan pemerintahan melainkan negara, atau negaranisasi pemerintahan.

Sutoro Eko menjelaskan bahwa governabilitas konservatif yang anti legitimasi, melihat *ungovernability* bukan semata dari sisi pemerintah yang kelebihan beban (*overloaded*), tetapi pihak yang diperintah (diutamakan masyarakat) yang tidak bisa diperintah (*ungovernable*). Peraturan Pemerintah bisa untuk menyalurkan otoritas pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen bagi birokrasi dan teknokrasi untuk menyeret Pemerintah sekaligus untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *governability* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan sekaligus berkaitan dengan interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah dalam tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka untuk memahami lebih lanjut tentang *governability*, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada dimensi *governability*. Secara khusus, penelitian ini mengarahkan perhatian pada dimensi *governability* yaitu kapasitas pemerintah desa.

Kapasitas (*capacity*) memiliki makna kemampuan. Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu. Jika dihubungkan dengan tugas atau pekerjaan, maka kemampuan berarti dapat (kata sifat atau keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa dengan yang diharapkan. Menurut Alam dan Prawitno (2015: 95) memahami kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai - nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2004) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Pemahaman tentang kapasitas dalam lingkup institusi Pemerintah pada umumnya menyorot pada tiga aspek, yaitu organisasi sebagai wadah maupun proses, sumber daya manusia, dan sistem dan tata laksana. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang dikelola secara bersamaan dan pada umumnya dimaknai sebagai institusi. Haboddin (2015) mengatakan bahwa perpaduan dari kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin ketika mengelola pemerintahan menghasilkan *governability*. Keahlian, profesionalisme, keterampilan, dan kerja justru wajib disertai kapasitas politik dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, kapasitas politik dan kapasitas teknokratik ini membentuk pola *governability* yang kuat. Kedua kapasitas ini sangat penting terutama dalam menyediakan public goods ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan publik lainnya. Jika keduanya tidak saling mengimbangi, maka

kemampuan pemerintah akan dipertanyakan. Sedangkan menurut Rozaki (2005) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan yang mengandung arti keahlian, keterampilan dan profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja. Menurut Rozaki (2005), kapasitas Pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

- a) Kapasitas regulasi adalah kemampuan Pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
- b) Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan Pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat;
- c) Kapasitas distributif adalah kemampuan Pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal ini Kapasitas Distribusi akan dilihat dari anggarannya;
- d) Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk di jadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa;
- e) Kapasitas jaringan adalah kemampuan Pemerintah dan warga masyarakat dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan individu maupun organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika dipahami seperti itu, kapasitas Pemerintah desa berarti kemampuan dan keterampilan Pemerintah desa dalam mengatur, melayani, dan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini kapasitas akan di analisis melalui lima fokus yaitu tentang kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distributif, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan. Sebagaimana dalam pengembangan objek wisata budaya terkait dengan kemampuan Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, mengoptimalkan aset-aset Desa, membagi sumberdaya secara merata, memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta mengembangkan jaringan kerjasama antara masyarakat.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut dengan Pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekedar pemerintahan desa, bukan hanya sekedar Pemerintah desa serta bukan hanya sekedar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

Berikutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2019 mengatur lebih detail mengenai kepala desa dan perangkat desa. Untuk perangkat desa telah ditentukan mengenai jumlah unsur sekretariat pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis, yang menggambarkan mengenai unit-unit kerja dalam organisasi pemerintah desa. Tidak ada pendelegasian secara eksplisit untuk pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pemerintah desa kepada peraturan menteri. Akan tetapi, dalam pasal 62 dan 64 menentukan bahwa urusan dan pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur lebih detail mengenai Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah urusan atau unit kerja dalam sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, serta sebutan pejabat yang memimpin, yakni: (1) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 urusan yakni Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing dipimpin Oleh Kepala Urusan; (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta luas wilayah kerja, karakteristik geografis, kepadatan serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur pelaksana teknis masing-masing dipimpin oleh dusun atau sebutan lain serta peraturan



- bupati; (3) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- 2) Jumlah urusan dikaitkan dengan jelas desa, yakni: (1) Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (2) Desa swakarsa dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (3) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi;
  - 3) Kedudukan, tugas, dan fungsi mulai dari kepala desa, sekretariat desa, urusan-urusan, pelaksana kewilayahan, dan seksi-seksi;
  - 4) Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota (Triputro, 2019: 58-59).

Kewenangan Pemerintah Desa adalah hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti

pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan.. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat) (Sutoro Eko, 2015: 101).

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang mencakup pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Kewenangan pemerintah desa dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat.

### **3. Pengembangan Potensi**

#### **a. Pengertian Pengembangan**

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008), pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya menjadi atau tambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan. Sedangkan, menurut istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan.

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Poerwa Darminta (2002:474) menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Menurut Sunardi (2015: 15), pengembangan adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

## **b. Pengertian Potensi**

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006:37).

Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah (Endra K Pihadhi, 2004:6). Potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik (Sri Habsari, 2005).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan potensi merupakan kemampuan yang dimiliki dan harus dimanfaatkan secara optimal dengan menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis agar dapat meningkatkan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

## **4. Wisata Budaya**

### **a. Pengertian Pariwisata**

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan ke bahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya Burkart dan Medlik (1987) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar

lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

#### **b. Pengertian Budaya**

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (2000: 181) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta "*buddhayah*", yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu.

Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas, Koentjaraningrat (2000: 181) membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan

sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Menurut Liliweri (2002: 8) kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Taylor dalam Liliweri (2002: 62) mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat-istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat.

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Linton dalam Ihromi (2006: 18). Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi

cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Wisata budaya merupakan gerak atau kegiatan wisata yang dirangsang oleh adanya objek-objek wisata berwujud hasil-hasil seni budaya setempat, seperti adat istiadat, upacara-upacara, agama, tata hidup masyarakat setempat, peninggalan-peninggalan sejarah, hasil-hasil seni, kerajinan rakyat dan kemampuan-kemampuan lain yang di dapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam penelitian tentang wisata budaya ini, yang mau dikembangkan yaitu terkait sarana dan prasarana seperti akses jalan, toilet umum, rumah makan; serta pemberdayaan masyarakat desa.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Kapasitas Regulasi
2. Kapasitas Ekstraksi
3. Kapasitas Distributif
4. Kapasitas Responitif
5. Kapasitas Jaringan.



## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Lasa, 2009:7). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Taylor dan Bogdan (2017) adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Sedangkan Soerjono Soekanto 2012 berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau obyek panel (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.

## **2. Unit Analisis**

Secara fundamental unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Atau dalam definisi lain, unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

### **a) Obyek Penelitian**

Menurut Supratno (2000:1) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan dari obyek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya.

### **b) Subyek Penelitian**

Yang dimaksudkan dengan subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989; 862) atau dengan definisi lain subyek penelitian merupakan keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola Objek wisata budaya, dan Masyarakat Desa Umbu Pabal.

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik purposive informan, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan obyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa Umbu Pabal
- 2) Sekretaris Desa Umbu Pabal
- 3) Pengurus atau pengelola Objek Wisata Budaya ( 3 Orang)
- 4) Tokoh Masyarakat (2 Orang)

**Tabel 1. 1 Data Informan**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>USIA (Tahun)</b>	<b>JABATAN</b>
1	Soleman Umbu Sedu	Laki-laki	34	Kepala Desa
2	Obed Bayu Umbu Laja	Laki-laki	36	Sekretaris Desa
3	Umbu Ngadu Homba	Laki-laki	57	Lembaga Adat
4	Maramba Weki	Laki-laki	60	Lembaga Adat
5	Nikodemus Hina Malotu	Laki-laki	51	Lembaga Adat
6	Evandro Pasalang	Laki-laki	25	Tokoh Masyarakat
7	Marinus Umbu Eda	Laki-laki	28	Tokoh Masyarakat

*(Sumber : Wawancara Pribadi 2023)*

### **c) Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

## **b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai potensi pengembangan wisata desa berbasis budaya.

## **4. Metoda Pengumpulan Data**

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum

peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Umbu Pabal.

Menurut Yusuf (2014:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

## **b. Wawancara**

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto (2016:199) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

## **c. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang

sudah ada. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informasi. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. dengan demikian data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis atau ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Dalam pendekatan kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data



yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data-data terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak saat memutuskan kerangka konsep, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan penemuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain-lain). Proses ini berlangsung sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

## **b. Penyajian Data**

Penyajian data (*Data Display*) dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat jelas dan lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, hal ini mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

## **c. Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahap ini penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju

kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap kesimpulan data senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Secara singkat makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, dan validitasnya (Emzir,2016:133).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA UMBU PABAL

#### A. Gambaran Umum Desa Umbu Pabal

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Umbu Pabal merupakan Kawasan yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang Dinamis, baik dari aspek pemerintahan, perekonomian, kependudukan maupun sosial kemasyarakatan. Secara geografis aspek itu akan berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Disamping pengaruh yang bersifat positif, juga membawa implikasi kehidupan. Sehingga Desa Umbu Pabal menjadi daerah yang cukup kompleks dengan berbagai aktivitas, Kawasan wilayah Desa Umbu Pabal adalah kawasan *trans-sosial* antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan perkembangan komunitas pedagang, pengusaha maupun pencari kerja yang akseleratif sehingga terjadi peningkatan kebutuhan hidup.

Secara umum keadaan tanah di Desa Umbu Pabal termasuk kategori subur. Wilayah Desa Umbu Pabal memiliki sawah yang cukup banyak namun seiring waktu dan sesuai kebijakan Kabupaten bahwa wilayah Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat umumnya dan Desa Umbu pabal sebagian besar dialih fungsikan menjadi rumah tinggal. Sesuai dengan peta Desa Umbu Pabal Memiliki luas 240 Ha hektar yang terdiri dari:

**Tabel 2. 1 Luas Lahan Menurut Peruntukan**

<b>No</b>	<b>Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1	Perkantoran	1
2	Rumah Sakit	2
3	Tempat Ibadah	3
5	Sekolahan	6
6	Lapangan	1,5
7	Jalan	2,5
7	Lain-lain	23
9	Perkebunan Rakyat	25
11	Pemukiman Penduduk	50
12	Sawah	50
12	Kebun	60
<b>JUMLAH</b>		<b>240</b>

*(Sumber: Profil Desa Umbu Pabal Tahun 2023)*

Rincian kondisi Geografis Desa Umbu Pabal adalah sebagai berikut:

1. Ketinggian tempat : 150 mdpl
2. Curah hujan : 2.704 mdpl
3. Suhu udara : 26'-32' celcius

Adapun letak dan batas wilayah Desa Umbu Pabal adalah Sebagai Berikut:

1. Batas Utara : Umbu Jodu, Maradesa Selatan
2. Batas Barat : Umbu Mamijuk
3. Batas Timur : Umbu Langang
4. Batas Selatan : Umbu Pabal Selatan

## b. Orbitasi

Secara Geografis letak Desa Umbu Pabal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintah relatif dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut:

1. Jarak dari kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat : 3,5 KM
2. Jarak dari Kabupaten Sumba Tengah : 10 KM

## c. Pembagian Wilayah Desa Umbu Pabal

Pembagian wilayah Desa Umbu Pabal terdiri dari 3 Dusun, 6 RW, dan 12 RT. Wilayah Dusun serta Kepala Dusun Desa Umbu Pabal adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Dusun dan Kepala Dusun Desa Umbu Pabal**

No	DUSUN	KEPALA DUSUN
1	Kambajawa	Risno U. Pangerang
2	Tomburara	Yusup Tara Bani
3	Awanang	Jimi Umbu Gaja

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Umbu Pabal 2021-2026)

## 2. Keadaan Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah Seluruh Penduduk di Desa Umbu Pabal Sebanyak 1.454 Jiwa, berikut adalah table jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	634	43.60
2	Perempuan	820	56.39
<b>Jumlah (Jiwa)</b>		<b>1. 454</b>	<b>100,00</b>

*(Sumber: Profil Desa Umbu Pabal Tahun 2023)*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hamper berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran kuantitas perempuan lebih tinggi disbanding laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Desa Umbu Pabal didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin perempuan mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses Pendidikan, mengembangkan ketrampilan, maupun memperoleh kesempatan kerja. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Eksistensi perempuan di era sekarang ini sudah mulai diperhitungkan di banyak ranah, karena perempuan dapat dikatakan memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam banyak segi, baik itu kualitas cara berpikir dan berintelektual maupun keterampilan.

#### b. Jumlah Penduduk Berdasarkan RT

Desa Umbu Pabal mempunyai 12 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan Rukun Tetangga.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga (RT)**

No	Rukun Tetangga	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	RT 01	152	10.45
2	RT 02	120	8.25
3	RT 03	44	3.02
4	RT 04	231	15.88
5	RT 05	182	12.51
6	RT 06	162	11.14
7	RT 07	105	7.22
8	RT 08	120	8,25
9	RT 09	160	11.00
10	RT 10	88	6.05
11	RT 11	32	2.20
12	RT 12	58	3.98
<b>Jumlah (Jiwa)</b>		<b>1. 454</b>	<b>100,00</b>

*(Sumber: Profil Desa Umbu Pabal Tahun 2023)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Umbu Pabal berjumlah 1.454 Jiwa. Penduduk Desa Umbu Pabal tersebar di 12 RT. Mayoritas penduduk Desa Umbu Pabal berada di RT 04 yang mana penduduknya berjumlah 231 jiwa (15.88%). Sedangkan Minoritas penduduk Desa Umbu Pabal berada di RT 11 yang mana penduduknya berjumlah 32 jiwa (2.20%).



### c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menjalani kehidupan yang layak dan bisa memperbaiki perekonomian. Pendidikan masyarakat di Desa Uumbu Pabal tergolong cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa masyarakat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar/Sederajat sampai tingkat perguruan tinggi (diploma dan sarjana). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	156	10.72
2	SLTP/Sederajat	206	14.16
3	SLTA/Sederajat	460	31.63
4	Diploma 1	4	0.27
5	Diploma 2	6	0.41
6	Diploma 3	50	3.43
7	Strata 1	166	11.41
8	Strata 2	27	1.85
9	Strata 3	3	0.20
10	Belum Tamat SD	229	15.74
11	Tidak/Belum Sekolah	147	10.11
<b>Jumlah (Jiwa)</b>		<b>1.454</b>	<b>100,00</b>

*(Sumber: Profil Desa Uumbu Pabal Tahun 2023)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan di Desa Uumbu Pabal boleh dibilang cukup baik. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Uumbu Pabal tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Strata 3. Mayoritas penduduk Desa Uumbu Pabal pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Uumbu

Pabal cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Desa Umbu Pabal. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Desa Umbu Pabal sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang memadai ini, maka terobosan-terobosan dan ide-ide konstruktif untuk membangun Desa dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Meskipun demikian, Desa Umbu Pabal juga diharapkan untuk terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Umbu Pabal adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat di Desa Umbu Pabal terdapat 229 jiwa atau sekitar 15.74% masyarakat yang belum menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Selain itu, terdapat 147 atau sekitar 10.11% masyarakat yang tidak atau belum mengenyam pendidikan.

### **3. Keadaan Ekonomi**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Umbu Pabal bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Tengah. Hal lain yang perlu

diperhatikan dalam pembangunan Desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Umbu Pabal yang masih tinggi yaitu 43,27% ini terjadi karena keadaan sosial masyarakat yang mengharuskan untuk membawa hewan (Kuda, Babi, Sapi, Kerbau) dengan jumlah yang banyak untuk melaksanakan acara ritual adat kematian dan acara adat istiatan perkawinan. Sehingga walaupun masyarakat Desa Umbu Pabal memiliki pekerjaan, tetap saja masyarakat Desa Umbu pabal memiliki utang karena kegiatan adat yang selalu ada. Ini menjadikan Desa Umbu Pabal harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Umbu Pabal amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

#### **4. Keadaan Sosial**

Kehidupan di Desa Umbu Pabal tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitar. Masyarakat desa masih cukup kental dengan gotong royong, Salah satunya terlihat ketika ada masyarakat atau warga yang mengalami musibah maka dengan sendirinya warga akan berdatangan untuk membantu baik dalam bentuk moril maupun materil. Selain itu dalam organisasi kemasyarakatan, masyarakat desa Umbu Pabal juga turut berpartisipasi aktif. Berikut adalah tabel organisasi kemasyarakatan di Desa Umbu Pabal yang masih aktif.

**Tabel 2. 6 Organisasi Kemasyarakatan**

<b>NO</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
1	PKK	Aktif	2
2	Posyandu	Aktif	4
<b>Total</b>			6

*(Sumber: Profil Desa Umbu Pabal Tahun 2023)*

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan masih berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada saat ini kegiatan sosial kemasyarakatan jarang dilakukan karena berbagai hal.

## **5. Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan**

Masyarakat di Desa Umbu Pabal masih melestarikan kegiatan kebudayaan yang dimilikinya. Dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan ini, masyarakat di Desa Umbu Pabal masih melakukan berbagai kegiatan seperti Upacara/ritual adat “Purungu Ta Liang Marapu”, Upacara Kematian dengan mengangkat batu dan menyembelih hewan (Kuda, Babi, Kerbau, Sapi), Adat istiadat perkawinan dengan 3 tahapan yaitu “Ngidi Pamama, Pitak Pamama, dan Dadang Nulang Lunung Tapu”

Dalam konteks agama, mayoritas masyarakat di Desa Umbu Pabal menganut agama Kristen Protestan dan khatolik yaitu sebanyak 780 jiwa (53%). Sementara itu, sekitar 33% (450 jiwa) masyarakat Desa Umbu Pabal menganut kepercayaan Marapu. Sedangkan sebanyak 127 jiwa (10%) masyarakat di Desa Umbu Pabal memeluk agama Islam dan sebanyak 97 jiwa (4%) masyarakat memeluk agama Hindu.

## 6. Keadaan Prasarana

Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Prasarana meliputi prasarana ibadah, prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya. Berikut adalah tabel prasarana.

**Tabel 2. 7 Prasarana Desa Umbu Pabal**

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	4
2	Gereja	2
3	TK	1
4	SD	1
5	Pasar Desa	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

*Sumber: Profil Desa Umbu Pabal Tahun 2023*

## 7. Kondisi Pemerintahan Desa Umbu Pabal

Struktur Pemerintah Desa Umbu Pabal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Soleman Umbu Sedu, S.Kom
2. Sekretaris Desa : Obed Bayu Laja
3. Bendahara : Ni Putu Sri Lestari
4. Kaur Umum : Imelda Rambu Hori Baba
5. Kasie Pem : Piter Regalima
6. Kasie Kesra : Dominggus U.D.Kapu Eda
7. Kadus I : Risno Umbu Pangerang
8. Kadus II : Yusup Tara Bani
9. Kadus III : Jimi Umbu Gaja

Pemerintah Desa Umbu Pabal belum melengkapi Struktur Organisasi, mengingat bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa sangatlah penting yang dianggap sepele, Sejatinya, struktur organisasi ini berfungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai siapa saja yang memiliki wewenang dan dapat mengawasi kinerja para pejabatnya. Bagi Pemerintah Desa, adanya struktur ini juga menjadi pedoman akan alur pertanggungjawaban tugas dan wewenang yang dimiliki. Sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

## **B. Gambaran Umum Objek Wisata Budaya**

### **1. Sejarah Objek Wisata Budaya**

Ritual adat “Purung Taliang Marapu” (Turun ke Goa marapu) tidak ditemukan dalam catatan-catatan maupun peninggalan- peninggalan prasasti pada masyarakat penganut kepercayaan Marapu di kampung Deri Kambajawa walaupun memiliki tradisi batu megalitik namun tidak memiliki corak tulisan tapi berupa relief ukiran yang menghiasi batu kubur megalitik, tiang rumah adat, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dilapangan dengan Lembaga adat dan Tokoh-tokoh Marapu, dan pemerintah Desa Umbu Pabal diperoleh data atau informasi bahwa ada 5 (Lima) suku kabisu yang mendukung ritual ini yaitu :

- 1.Kabisu Deri /Ina Ama;
- 2.Kabisu Oalarong;
- 3.Kabisu Ranunyaka;
- 4.Kabisu Tokang;
- 5.Kabisu Lago.

Tugas seorang Ina Ama dari kabisu Deri adalah memberikan bahan-bahan persembahan untuk Dewa-Dewa di Goa Taliang Marapu. Orang yang pergi ke Goa tersebut haruslah suci lahir bathin, sedangkan bagi orang yang berbuat dosa harus membawa ayam atau hewan yang belum kawin untuk dipakai sebagai sarana mohon ampunan dari dosa yang diperbuat. Mereka semuanya kumpul pertama di rumah adat (uma walunogul walukabaringu), selanjutnya kabisu Goalarung sebagai pembuka jalan. Tonguli itu sebagai pembawa acara dalam pembukaan Upacara Purung Taliang Marapu.

Penango Purung bertugas mengumpulkan masyarakat untuk ikut upacara. Tokang bertugas mengatur dan mengkoordinir kegiatan upacara. Upacara ini dilaksanakan tanggal 22 September sampai dengan tanggal 10 Oktober rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sarana upacaranya adalah ayam 2 (dua) ekor dipotong dan dimasak / direbus, sirih pinang, serta makanan atau minuman. Upacara Purung Ta Liang Marapu juga diiringi dengan kesenian berupa tarian Reja dan Rengo yang dipentaskan mulai tanggal 6 dan 8 oktober tiap tahunnya. Tari Rengo adalah tarian yang dimainkan oleh 4 (Empat ) orang perempuan, sedangkan tari Reja adalah tarian y yang terdiri dari banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Upacara Purung Ta Liang Marapu dipimpin oleh Rato (kepala suku) dibantu anggotanya. Mereka berarak turun ke Liang Marapu (Goa Marapu) didalam Goa tersebut ada sebuah batu yang bernama watu kaballa ( Batu Kilat). Selanjutnya dihaturkan persembahan di batu didalam Goa tersebut dengan ucapan: Ya Tuhan, Terimalah Persembahan kami ini, berikanlah kami bimbingan,

berkat serta karuniamu, Air kemudian disiram dan dimandikan dengan air bersih atau air suci.

Sirih pinang juga dibuang disana. Kalau sirih pinang tenggelam itu artinya baik/ diterima/ boleh datang lagi. Sebaliknya apabila sirih pinang terapung maka itu artinya tidak diterima dan tidak boleh datang lagi kesana karena masih ada dosa bagi yang berbuat dosa/ kesalahan yang harus diperbaiki/ membersihkan diri.

Maksud dan tujuan upacara “Purung ta Liang Marapu” adalah untuk mengetahui kemakmuran hasil panen mereka apakah akan berhasil atukah akan gagal. Upacara tersebut harus tetap dilaksanakan dari tahun ke tahun. Uumbu Pabal adalah beliau yang membawa keberuntungan / Batu Kilat (Marapu). Persembahan itu sebagai perantara supaya permohonannya diberkati, untuk mohon berkat/ anugerah. Mereka berkemah/ bermalam sampai besok pagi di dekat goa marapu. Siangnya baru mereka pulang. Pada hari terakhir ada acara pembersihan diri. Pakaian mereka serta kain-kain dicuci bersih untuk dipakai lagi tahun depan.

## **2. Asas Pembentukan**

Tradisi turun temurun yang menjadi warisan budaya nasional dan UNESCO terdaftar di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Gerakan Literasi Nasional Dengan nomor Registrasi 2013003103, Tahun 2013, Domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Uumbu Ratu Nggay Barat Desa Uumbu Pabal.



### **3. Visi Objek Wisata Budaya**

Terwujudnya Peningkatan Wisata budaya berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat Desa Umbu Pabal

### **4. Misi Objek Wisata Budaya**

- 1) Mengelola jasa Wisata budaya
- 2) Peningkatan sarana prasarana Wisata Budaya

### **5. Kepengurusan Objek Wisata Budaya**

Untuk saat ini kepengurusan objek wisata budaya ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Umbu Pabal dan Lembaga Adat. Dulunya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Karang Taruna, ikut andil dalam pengembangan wisata budaya ini tetapi saat ini semenjak Covid-19 sudah tidak dilaksanakan lagi karena tidak aktif.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan hasil analisis terkait kapasitas Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebenarnya sudah ada yang dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pengelolaan wisata budaya Desa Uumbu Pabal, Peraturan Kepala Desa (PERKADES) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pengembangan kawasan wisata budaya dan usaha wisata Desa Uumbu Paba, tetapi beberapa tahun belakangan ini kebijakan tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi dikarenakan Pemerintah Desa Uumbu Pabal lebih mengutamakan pengembangan di sektor pertanian dan juga pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sehingga pemulihan ekonomi masyarakat lebih diutamakan.
2. Dari hasil pendataan objek wisata terdapat cukup banyak objek wisata dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa, tetapi belum dikembangkan oleh Pemerintah Desa Uumbu Pabal.
3. Pemerintah Desa Uumbu Pabal belum mengalokasikan sumber daya berupa dana untuk objek wisata budaya 2 tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena pemerintah desa hanya berkonsentrasi pada penganggaran dan pengalokasian sumberdaya kepada pembangunan desa lainnya, dan juga dalam objek wisata ini belum ditetapkan retribusi wisata sehingga wisata ini masih gratis.

4. Lemahnya Koordinasi Kelembagaan Desa, Pendanaan dan sebagainya sehingga pengembangan wisata budaya mengalami penyusutan baik sarana prasarana dan fasilitas pendukung wisata budaya.
5. Kemampuan membangun jejaring dan kerjasama Pemerintah desa dengan masyarakat desa masih sangat terbatas dan sebenarnya kurang berdampak signifikan pada pengembangan objek wisata di Desa Umbu Pabal karena masyarakat desa masih sulit untuk mengakses informasi dari Pemerintah Desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan keseluruhan hasil analisis terkait kapasitas Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya, disarankan agar :

1. Perlu adanya pelaksanaan lanjutan terkait dengan kebijakan yang telah ada sehingga objek wisata budaya tersebut tidak terabaikan.
2. Pemerintah Desa perlu mengembangkan potensi yang ada di Desa Umbu Pabal
3. Pemerintah Desa juga harus fokus terhadap pendanaan objek wisata sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata budaya tersebut dan perlu meningkatkan pengembangan objek wisata khususnya dalam pembuatan retribusi wisata sehingga dapat menambah pendapatan asli desa.
4. Perlu adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah desa sehingga dalam pengembangan objek wisata budaya bisa berjalan dengan baik.

5. Perlu adanya peningkatan dalam kerjasama antara Pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga dalam pengembangan objek wisata budaya dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S Moenir, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Alo Liliweri. 2002. Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya. Yogyakarta. PT. LkiS Pelangi Aksara
- A.W. Widjaja. 2003, Otonomi Desa. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Anni Milen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Abdur Rozaki, dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, IRE Press.
- A. Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta : prenadamedia group.
- Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. 198. Tourism, Past, Present, and Future. London.
- Burrell, G., & Morgan, G. 2006. *Sociological paradigms and organizational analysis*. Aldershot, Gower.
- Eko, Sutoro (ed). 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. 2014. *Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Gamal, Suwanto, 2002. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ihromi. 2006. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Lasa HS. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Muhtar, Haboddin. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press.
- Moenir. 2000. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminta WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- Prihadhi, Endra K. My Potensi. Jakarta: Elek Media Komputindo, 2004
- Prawitno, Alam. 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Suffian. Administrasi Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru. UIRPRESS.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sukardi, Nyoman. 1998. Pengantar Pariwisata. STP Nusa Dua Bali.
- Supranto, J. 2000. Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Suut Amdani. 2008. Analisis Potensi Obyek Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi. Surakarta : Fakultas Geografi UMS.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunardi, S. 2017. Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember.
- Kooiman, Jan. 1994. *Modern Governance : New Goverment-Society Interactions*
- Kodhyat, H. 1998. *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesea*. Jakarta: Grasindo.
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Cet. VIII. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Taylor dan Bogdan. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya

Triputro, Widodo. 2019. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Wiyono, S. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.

## **Jurnal**

Indrawan, M. I., Adil, E., & Sari, D. S. 2022. Model Tata Kelola Pemerintahan Desa Gada Berbasis Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kualitas Pelayanan Untuk Mendukung Pencapaian Desa Wisata. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/11681>

Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. 2018. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158-174. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/view/2340>

Kooiman, Jan. 1994. Dalam Jurnal Wahyu, Mardiyanto. Triyantmoko. 2016. *Pemekaran Daeran dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia*, 2020 pada link <http://ejournal.politik.lipi.go.id>. <http://repo.apmd.ac.id/1782/>

Lestari, G., Armawi, A., & Muhamad, M. 2016. Partisipasi pemuda dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 137-157. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/17302/0>

Sentanu, I., & Sriyono, M. E. E. 2022. Pembrdayaan Masyarakat Desa Melalui Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dengan Konsep *Pentha Helix*. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1185>

Sutiarso, M. A. 2018. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Desa Selumbung, Karangasem. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 3(2), 14-23. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/article/view/594>

Tou, H. J., Noer, M., & Lenggogeni, S. 2022. Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Pengembangan Desa wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*, 10(02), 95-101. <http://repo.bunghatta.ac.id/8634/>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Usaha Pariwisata.

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Desa Umu Pabal.

Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Usaha Wisata Desa.

### **Internet**

<https://jurnal.apmd.ac.id>

<http://eprints.ums.ac.id>

<http://eprints.ums.ac.id>

<https://elearning.undana.ac.id>

### **Sumber Lain**

Kamus                      Besar                      Bahasa                      Indonesia                      (KBBI).



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Bagi Pemerintah Desa**

Nama :

Umur :

Alamat :

- 1) Bagaimana anda melihat wisata budaya yang ada di Desa Umbu Pabal ?
- 2) Apakah ada kebijakan tentang pengembangan potensi wisata budaya ?
- 3) Apakah ada pendanaan untuk wisata budaya di Desa Umbu Pabal ?
- 4) Apakah ada program untuk pengembangan wisata budaya di Desa Umbu Pabal ?
- 5) Bagaimana Keterlibatan Masyarakat Desa umbu Pabal dalam pengembangan potensi wisata budaya?
- 6) Menurut pandangan anda, apakah wisata budaya yang ada di Desa Umbu Pabal memberikan kontribusi terhadap pembangunan Desa ?
- 7) Manfaat apa saja yang didapatkan dari wisata bagi Desa ?
- 8) Bagaimana Interaksi antar masyarakat dan Pemerintah Desa ?
- 9) Bagaimana kegiatan kemasyarakatan di Umbu Pabal ?

### **B. Bagi masyarakat pengelola wisata budaya di Desa Umbu Pabal**

Nama :

Umur :

Alamat :

- 1) Sejak kapan wisata budaya ini didirikan dan apa spirit terbentuknya wisata budaya ini ?
- 2) Bagaimana Koordinasi ataupun pembiayaan yang diselenggarakan terhadap wisata ?
- 3) Bagaimana upaya pengelola dalam menggerakkan masyarakat lain untuk terlibat dalam kegiatan wisata budaya ?
- 4) Apakah ada pelatihan atau dampingan dari pemerintah desa bagi pengembangan wisata budaya ?
- 5) Apa saja kendala dalam memajukan wisata budaya Desa Umbu Pabal ?
- 6) Menurut pendapat anda, kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Umbu Pabal dalam memajukan wisata budaya?
- 7) Bagaimana pengembangan wisata budaya dari tahun ke tahun?
- 8) Menurut anda, apa upaya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa ?

### **C. Bagi Masyarakat Desa Umbu Pabal**

Nama :

Umur :

Alamat :

- 1) Apa yang anda ketahui tentang wisata buda Desa Umbu Pabal ?
- 2) Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan masyarakat desa ?
- 3) Bagaimana relasi pemerintah dan masyarakat ?
- 4) Apa yang menjadi penyebab tidak adanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah terkait wisata budaya ?
- 5) Menurut pendapat anda, seberapa responsive pemerintah desa dalam menanggapi program dalam pengembangan wisata budaya?
- 6) Sejauh yang anda ketahui, permasalahan apa yang menghambat perkembangan wisata ini ?

## SURAT IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B  
• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 121/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Rustini rambu Kuba Yowi  
Nomor Mahasiswa : 19520072  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Desa Umbu Pabal ,Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah  
b. Sasaran : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi di Desa Umbu Pabal ,Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah  
c. Waktu : 8 Maret 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Maret 2023

Ketua  
  
Dr. Sutono Eko Yunanto  
NIP. 1970 230 190

**PERHATIAN :**  
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 250/I/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Desa Umbu Pabal ,Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 8 Maret 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Rustini rambu Kuba Yowi  
No Mhs : 19520072  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembanagan Potensi Wisata Budaya (Studi di Desa Umbu Pabal ,Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah)  
Tempat : Desa Umbu Pabal ,Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah  
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Maret 2023



Dr. Sutopo Eko Yunanto  
170 230 190

## SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 560775. Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 114/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rustini Rambu Kuba Y  
No. Mahasiswa : 19520072  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022  
Judul Proposal : Potensi Pengembangan Wisata Desa Berbasis Budaya (Studi Di desa Umu Pabal Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## DOKUMENTASI



(Wawancara bersama Bpk. Soleman  
Kepala Desa Umbu Pabal, 10/03/2023)



(Wawancara Bersama Bpk. Obed  
Sekretaris Desa,14/03/2023)



(Wawancara Bersama Lembaga Adat di Desa Umbu Pabal, 20/03/2023)





**(Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat di Desa Umbu Pabal 26/03/2023)**



**(Perangkat Desa Umbu Pabal)**

**Dokumentasi Objek Wisata Budaya**

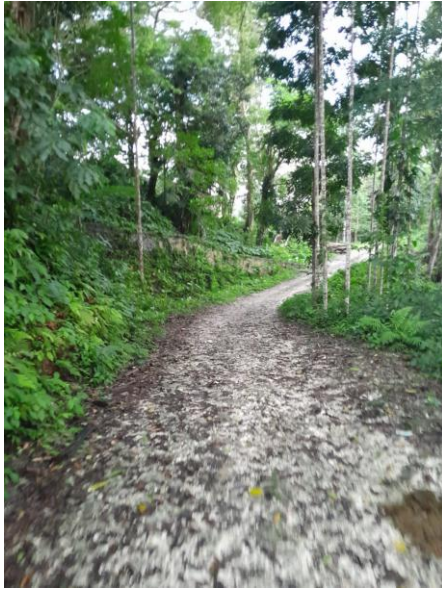


**(Rumah-Rumah Adat, Rumah Marapu, Lopo )**





**(Kuburan Megalitik/Kuburan dulu)**



**(Jalan Menuju Objek Wisata Budaya)**